

EDISI PERALIHAN WILAYAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Rabu 1 Nopember

RINGKASAN BERTA HARI NI



DPRD Sidoarjo Dorong Pemkab Maksimalkan APBD 2024

DPDRD Sidoarjo beres-beres Pemkab Sidoarjo mengoptimalkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Progres yang dilakukannya adalah mengupayakan pemaksimalan APBD Sidoarjo tahun 2024/2025.

Penyusunan rencana keuangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024/2025 akan dilakukan pada bulan Agustus 2023. DPRD Sidoarjo akan melakukan pembahasan terhadap APBD 2024/2025. DPRD Sidoarjo akan melakukan pembahasan terhadap APBD 2024/2025. DPRD Sidoarjo akan melakukan pembahasan terhadap APBD 2024/2025.



Komunikasi Perangkat Desa Kedungcangring Jabon Diduga Bobrok

Sidoarjo, Pejabat Kiri Kabupaten Jabon diduga bobrok komunikasi perangkat desa Kedungcangring Jabon. Hal ini diduga karena komunikasi perangkat desa Kedungcangring Jabon diduga bobrok komunikasi perangkat desa Kedungcangring Jabon.

Salah satu perangkat desa Kedungcangring Jabon diduga bobrok komunikasi perangkat desa Kedungcangring Jabon. Hal ini diduga karena komunikasi perangkat desa Kedungcangring Jabon diduga bobrok komunikasi perangkat desa Kedungcangring Jabon.



Kinerja Pendapatan Tumbuh Rp 478,56 Miliar

SIDOARJO - Kantor Pelayanan Pajak (KPPN) Kabupaten Sidoarjo melaporkan kinerja APBD. Sampai dengan 30 September 2023, kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan nominal Rp 478,56 M dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Perubahan ini didorong oleh peningkatan pendapatan pajak. Kinerja APBD tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Kinerja APBD tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif.



Diduga Ada Modus Mark Up Pembangunan Kios Pasar di Desa Karangbong

Pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up. Hal ini diduga karena pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up.

Salah satu modus mark up pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up. Hal ini diduga karena pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up.



Bupati Lantik Pengurus Dekesda Sidoarjo Masa Bakti 2022-2027

Bupati Sidoarjo melantik pengurus Dekesda Sidoarjo masa bakti 2022-2027. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi Dekesda Sidoarjo.

Salah satu pengurus Dekesda Sidoarjo masa bakti 2022-2027 adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi Dekesda Sidoarjo.

Berkunjung ke Kecamatan Candi, Mensos Berdayakan Masyarakat Melalui PENA

Bupati Sidoarjo mengunjungi Kecamatan Candi untuk berdayakan masyarakat melalui PENA. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Kecamatan Candi.

Salah satu kegiatan PENA di Kecamatan Candi adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Kecamatan Candi.

Gus Muhdlor Lantik Ketua Dekesda Terpilih

Gus Muhdlor melantik ketua Dekesda terpilih. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi Dekesda Sidoarjo.

Salah satu ketua Dekesda terpilih adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi Dekesda Sidoarjo.

Membangkan Sawah Wijen di TKD yang Mangkrak

Proses membangkan sawah di TKD yang mangkrak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap petani di TKD yang mangkrak.

Salah satu petani di TKD yang mangkrak adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap petani di TKD yang mangkrak.

Ruang Inap RSUD Sidoarjo Terbakar, Petugas Medis dan Keluarga Pasien Panik

Ruang inap RSUD Sidoarjo terbakar, petugas medis dan keluarga pasien panik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap RSUD Sidoarjo.

Salah satu keluarga pasien di RSUD Sidoarjo adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap RSUD Sidoarjo.

Sejahterakan Masyarakat, Gus Muhdlor Kebut Rehab 451

Gus Muhdlor berkebutuhan rehabilitasi 451 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten setempat tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Salah satu RTLH yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten setempat adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Diduga Ada Modus Mark Up Pembangunan Kios Pasar di Desa Karangbong

Pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.

Salah satu modus mark up pembangunan kios pasar di Desa Karangbong adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.

Sisa Dua Bulan, Garap Rangka Bangunan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon

Sisa dua bulan untuk menyelesaikan pembangunan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Salah satu lokasi pembangunan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Diduga Ada Modus Mark Up Pembangunan Kios Pasar di Desa Karangbong

Pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.

Salah satu modus mark up pembangunan kios pasar di Desa Karangbong adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.

Diduga Ada Modus Mark Up Pembangunan Kios Pasar di Desa Karangbong

Pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.

Salah satu modus mark up pembangunan kios pasar di Desa Karangbong adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.

Diduga Ada Modus Mark Up Pembangunan Kios Pasar di Desa Karangbong

Pembangunan kios pasar di Desa Karangbong diduga ada modus mark up. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.

Salah satu modus mark up pembangunan kios pasar di Desa Karangbong adalah... Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Karangbong.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kinerja Pendapatan Tumbuh Rp 478,56 Miliar

SIDOARJO - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Sidoarjo (KPPN) kembali merilis kinerja APBN. Sampai dengan 30 September 2023, kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan nominal Rp 478,56 M dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Pertumbuhan ini adanya kenaikan penerimaan PPN dengan nominal sebesar Rp 1.010,35M, Cukai Rp 343,22M PPI sebesar Rp 62,66M dan PNBPN Rp 57,41M, akan tetapi terdapat penurunan nominal di penerimaan PPh - Rp 992,99M, PBB Rp -0,003M dan Pajak lainnya Rp -2,08M.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Didi Prihadi Wibowo dalam paparannya mengatakan salah satu penerimaan PPh mengalami kontraksi adalah imbas dari Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang berakhir pada triwulan III tahun 2022. Penerimaan negara dari bukan pajak terus tumbuh sebesar 16,19% (yoy) antara lain dari PNBPN Lainnya 20,77%.

"Kinerja APBN untuk Belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian / Lembaga Kinerja Belanja Negara sampai dengan akhir September 2023 / Triwulan III 2023 menunjukkan realisasi sebesar 65,21% dengan nominal Rp3.538,47M, tumbuh 9,96% (yoy), yang terdiri dari pertum-

buhan Belanja Pegawai 10,59% (yoy), Belanja Barang 10,48% (yoy), dan Belanja Modal 6,02% (yoy), sedangkan pada belanja sosial sudah tidak terdapat penyaluran kembali dan realisasi sudah tercapai 100%," ungkap Didi.

Masih kata Didi melanjutkan, kinerja APBN untuk Transfer Ke Daerah (TKD) realisasi periode sampai dengan September 2023 sebesar 72,72% dari pagu Rp 2.361,62 M. Terdapat pertumbuhan sebesar 2,75% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tetapi terdapat kontraksi pada penyaluran DAK Fisik sebesar 43,41%.

Perlambanan penyaluran DAK Fisik ini disebabkan sampai dengan akhir September 2023, proses pengadaan barang / jasa masih terdapat yang belum diselesaikan dan APIP Kabupaten Sidoarjo masih melakukan audit

"Isu kinerja APBN saat ini telah memasuki periode langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2023 dan telah dilakukan sosialisasi pengaturan dimaksud kepada satuan kerja," ujarnya.

Hal yang menjadi permasalahan adalah masih rendahnya penyaluran belanja negara dana APBN pada kementerian / Lembaga yang pada akhir triwulan III 2023 seharusnya sesuai target adalah sebesar 75%, tetapi baru terealisasi 65,21%. • Loe



LOETFD/UTA

Kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (batik cokelat), Didi Prihadi Wibowo dalam paparan kinerja APBN dihadapan staf dan jajaran Selasa (31/10/23)

DUTA



Program Rehab RTLH

Sejahterakan Masyarakat, Gus Muhdlor Kebut Rehab 451

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau yang karib disapa Gus Muhdlor tahun 2023 ini merealisasikan rehabilitasi 451 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten setempat tahun 2023. Diantaranya rumah Sri Ita Silvia warga Desa Semambung RT.07 RW.02 Kecamatan Gedangan dan Umi Kalsum Desa Tambakrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Waru.

"Program bedah rumah menjadi salah satu komitmen Pemkab Sidoarjo menyejahterakan masyarakat," katanya saat dikonfirmasi di sela-sela kesibukannya, Selasa (31/10/23).

Ia mengatakan, program bedah rumah tersebut melibatkan lintas sektor karena selain dilakukan Pemkab Sidoarjo, program serupa juga datang dari Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

"Program rehab RTLH Pemkab Sidoarjo merenovasi 116 RTLH, kemudian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melalui Program pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) memperbaiki 165 rumah warga Sidoarjo. Dari Kementerian PUPR akan merenovasi 170 rumah warga



Salah satu rumah warga yang di rehabilitasi.

Sidoarjo melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," ujarnya.

Ia juga menambahkan, Baznas

Sidoarjo juga tidak ketinggalan melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu karena Baznas Sidoarjo sudah

melaksanakan perbaikan rumah sebanyak 108 unit.

"Jumlah tersebut dipastikan bertambah karena Baznas sudah memverifikasi jumlah pengajuan bedah rumah sebanyak 250 unit dari 400 pengajuan," ujarnya.

Dikatakannya juga, tahun ini ada sebanyak 116 unit RTLH yang mendapatkan bantuan perbaikan dari APBD Kabupaten Sidoarjo dan setiap tahun diupayakan program tersebut berjalan.

Gus Muhdlor menyampaikan saat ini sudah hampir separo pelaksanaan program rehab rumah itu sudah selesai dimana terdapat 46 unit rumah yang 100 persen selesai pengerjaannya. Dan 16 unit rumah sudah mencapai 50 persen tahap pengerjaannya.

"Sedangkan 54 unit rumah masih dalam proses perencanaan (penyusunan DED/RAB). Pelaksanaan pengerjaannya sendiri dimulai bulan Mei 2023 lalu. Kami targetkan akhir tahun seluruh pekerjaan program bedah rumah ini akan selesai," ucapnya.

Gus Muhdlor senang program bedah rumah di Kabupaten Sidoarjo didukung semua pihak mulai dari Provinsi Jawa Timur sampai pemerintah pusat. Baznas (Badan Amal Zakat Nasional) Sidoarjo juga mensupport program tersebut karena akan semakin banyak warga

Sidoarjo yang terbantu.

Gus Muhdlor meminta kepala desa proaktif dalam program bedah rumah tersebut dengan menyampaikan usulan penerima manfaat dari program ini supaya Pemkab Sidoarjo dapat segera membantu kesulitan warga.

Pemkab Sidoarjo sendiri juga akan proaktif terhadap bantuan bedah rumah dari lembaga lainnya seperti halnya bantuan serupa dari Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR serta Baznas Sidoarjo.

"Kami akan membuka ruang-ruang yang lain untuk membantu masyarakat, saya minta proaktif seluruh kepala desa, kalau ada usulan bedah rumah warganya bisa disampaikan ke kita, Kabupaten Sidoarjo juga akan selalu proaktif menyambut bantuan dari lembaga lain untuk kesejahteraan warga Sidoarjo, termasuk dari Baznas Sidoarjo," ucapnya.

Dalam program bedah rumah RTLH ini Pemkab Sidoarjo menetapkan beberapa kriteria kondisi rumah yang berhak mendapatkan bantuan. Di antaranya bangunan rumah lokal atau tradisional, pondasi rumahnya sudah rusak sebagian atau keseluruhan, tembok rusak atau tidak standar (belum dipester) serta struktur atapnya rusak sebagian atau keseluruhan. ● Lee

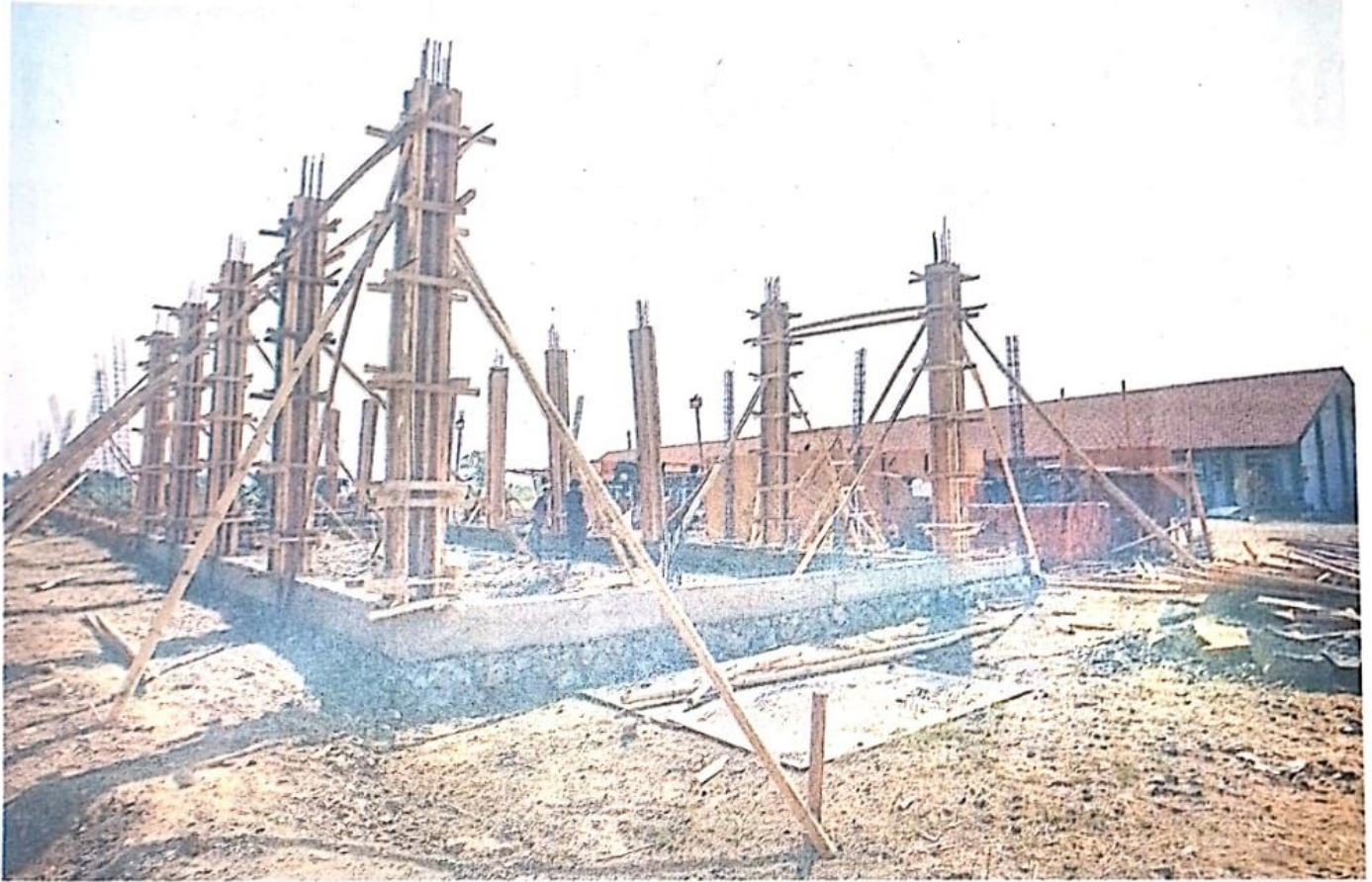
CS

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIMAS MAULANA/JAWA POS

BELUM TAMPAK FISIKNYA: Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung SMPN 2 Tulangan, Sidoarjo, kemarin.

Sisa Dua Bulan, Garap Rangka Bangunan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon

SIDOARJO - Pembangunan lanjutan SMPN 2 Tulangan dan SMPN 2 Prambon terus dikebut. Pembangunan fondasi di dua sekolah tersebut kini sudah tuntas. Saat ini para pekerja menuntaskan pembangunan rangka bangunan.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana, dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Heri Purwanto menyatakan, pembangunan dua sekolah tersebut berjalan beriringan. Saat ini petugas mulai menggarap pembangunan rangka atau pilar bangunan utama. Pada saat yang sama, pekerja juga

mulai menggarap pagar sekolah dan gapura masuk sekolah.

"Saat ini yang dikerjakan rangka bangunan masjid dan ruang kelas, di Tulangan dan Prambon sama," terang Heri kemarin. Fisik bangunan maupun tembok belum tampak terlihat. Padahal, akhir Desember pembangunan di sana harus sudah tuntas. Mulai pembangunan masjid, enam ruang kelas, kamar mandi, pagar, hingga gapura. Sisa masa pengerjaan hanya dua bulan lagi. Heri menyatakan, sebagai kontrol, pihaknya memantau langsung pengerjaan seminggu sekali. Tuju-

annya, memastikan pengerjaan proyek tersebut berjalan sesuai target. "Sekaligus mengecek kualitas pembangunannya," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi menyatakan, pembangunan sekolah harus tuntas akhir Desember. Sebab, awal Januari nanti siswa SMPN 2 Tulangan yang saat ini ditempatkan ke SMPN 1 Tulangan mulai direlokasi. "Siswa nanti dipindahkan setelah kelasnya siap," kata Tirto. Termasuk siswa SMPN 2 Prambon yang saat ini masih belajar di SMPN 1 Prambon. (uzi/c12/any)

Jawa Pos

BERSINERGI:
Penandatanganan nota kesepahaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Dari kiri, Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali SIP, Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes, Wakil Ketua Bambang Riyoko SE, Kayan SH, dan Dr Emir Firdaus SST MM.



SUGENG GRAS/JAWA POS

DPRD Sidoarjo Dorong Pemkab Maksimalkan APBD 2024

DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pengesahan dilangsungkan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sidoarjo Jumat (27/10).

Penandatanganan nota kesepahaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes, Wakil Ketua Bambang Riyoko SE, Kayan SH, dan Dr Emir Firdaus SST MM bersama Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali SIP. Hadir pula dalam agenda tersebut, forkopimda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, MUI Kabupaten Sidoarjo, direktur BUMN dan BUMD, rektor perguruan tinggi, dan pimpinan partai politik.

Pada Raperda APBD Kabupaten Sidoarjo 2024 terdapat sejumlah perubahan. Di antaranya, pendapatan daerah dari Rp 4,61 triliun naik Rp 846 miliar menjadi Rp 4,98 triliun. Untuk belanja daerah yang semula Rp 4,41 triliun menjadi Rp 5,25 triliun atau naik Rp 846 miliar. Sementara itu, alokasi pembiayaan daerah tetap Rp 350 miliar.

Adanya kenaikan di struktur pendapatan sebesar Rp 846 miliar tersebut akan digunakan untuk pembiayaan program prioritas Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), UMKM, pendidikan, serta peningkatan bidang kesehatan.

Usman mendorong agar Pemkab menyelesaikan program dan proyek yang

sudah dijalankan beberapa tahun terakhir. Dia juga berharap, APBD 2024 bisa diserap maksimal sesuai kesepakatan bersama. Dewan bakal terus mengawal realisasi APBD tersebut. "Eksekutif sebagai pelaksana harus bisa merealisasikan

dengan maksimal. Sehingga tercipta sebuah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan," ungkap Usman.

Tim Banggar DPRD Sidoarjo juga memberikan saran kepada Pemkab terkait penggunaan APBD 2024. Disampaikan oleh Jubir Banggar DPRD Sidoarjo H Moch. Agil Effendi, eksekutif diminta fokus menjalankan dan merealisasikan program prioritas sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Kami juga mendorong eksekutif untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai perencanaan agar realisasi APBD 2024 bisa maksimal," ungkap Agil.

Saran-saran juga diberikan oleh fraksi di DPRD Sidoarjo saat sesi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Salah satunya disampaikan H Haris SPI MSi yang merupakan perwakilan dari Fraksi PAN-PPP. Dia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan APBD 2024, Pemkab dituntut akomodatif dengan menyediakan banyak bantalan fiskal yang memadai. "Hal itu menjaga iklim kondusif untuk pembangunan serta pemilihan umum," ujarnya.

Gus Muhdlor, sapaan Ahmad Muhdlor, mengatakan bahwa setelah raperda disahkan, proses selanjutnya adalah evaluasi dari gubernur. APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut telah disusun berdasar pendekatan yang berpedoman pada prinsip tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, dan ekonomis.

"Diharapkan, APBD 2024 ini membawa manfaat bagi masyarakat. Serta, seluruh program bisa kami realisasikan dengan maksimal," ujar Gus Muhdlor. (ree/c6/xav)



Eksekutif sebagai pelaksana APBD 2024 diharapkan mampu melakukan penyerapan dengan maksimal sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Kami, legislatif, akan terus mengawal realisasi APBD 2024 ke depan."

H USMAN MKES
Ketua DPRD Sidoarjo



Jawa Pos

Berkunjung ke Kecamatan Candi, Mensos Berdayakan Masyarakat Melalui PENA

SIDOARJO (BM) - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Asuransi Astra menyelenggarakan Roadshow Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Sidoarjo. Sebanyak 68 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PENA yang terdiri dari 50 KPM PENA, 15 KPM PENA Berdikari dan 3 KPM PENA Disabilitas hadir memamerkan berbagai produk unggulan mereka di Kantor Kecamatan Candi, Minggu (29/10).

"Saya membuat program ini yang pertama untuk pengentasan kemiskinan, yang kedua, bagi saya mereka yang berjuang sungguh-sungguh itu adalah pahlawan bagi keluarganya,"

kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, di hadapan para KPM dan tamu yang hadir di Pendapa Kantor Kecamatan Candi.

Pada roadshow kali ini, Asuransi Astra menyerahkan bantuan modal senilai Rp 250 juta untuk 50 KPM PENA Sidoarjo. Vice President Asuransi Astra Djoko Nugroho Anindito mengatakan, Kemensos memiliki value atau nilai serta misi yang sama dengan Asuransi Astra.

"Kami ingin berpartisipasi dalam program PENA ini karena kami melihat value dan misinya sesuai dengan perusahaan kami. Kami ingin menjadi warga usaha yang melakukan tang-

gung jawab sosial serta mengubah lingkungan hidup secara berkesinambungan," kata Djoko.

Selain memamerkan berbagai produk karya mereka mulai dari makanan, minuman khas, tas hingga bonsai, KPM yang hadir juga bisa melakukan konsultasi desain dan pengelolaan finansial secara gratis di Klinik Usaha PENA. Klinik ini bekerja sama dengan Tata Rupa Nusantara yang digawangi oleh anak-anak muda yang ahli dalam bidang desain, pengelolaan keuangan hingga marketing produk.

Pada Roadshow PENA Sidoarjo ini, hadir pula Chef Marsum dari Surabaya Hotel School (SHS) yang mengajarkan KPM dan pemirsa PENA TV cara membuat banana crispy dan roti sisir pada workshop memasak.

Roadshow PENA di Sidoarjo juga menghadirkan para alumni Pahlawan Ekonomi Surabaya yang kini telah sukses.

Mensos juga menceritakan kisah sukses mereka untuk memberikan suntikan semangat kepada para KPM yang baru memulai usahanya dan menjalankan Program PENA. Dia menekankan siapapun bisa meraih sukses asalkan disertai tekad dan usaha yang sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha.

Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Candi Luchman Sanjaya, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmi Sari, para Staf Khusus Menteri Sosial, dan pejabat Kemensos terkait lainnya. (udi)



BM/ST

KUNJUNGAN MENSOS: Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kegiatan roadshow Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Sidoarjo.

Ruang Inap RSUD Sidoarjo Terbakar, Petugas Medis dan Keluarga Pasien Panik

Sidoarjo, Pojok Kiri

Kebakaran melanda balkon ruang inap RSUD Sidoarjo, Senin (30/10) malam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran itu, namun kejadian itu membuat petugas rumah sakit dan keluarga pasien panik.

Dalam rekaman video kamera salah satu keluarga pasien yang kebetulan berada di lokasi kejadian, tampak kobaran api muncul di balkon lantai 2 ruang rawat inap tulip.

Sejumlah petugas rumah sakit sempat panik dan dibuat kelabakan dengan kejadian itu. Dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan (apar), petugas berusaha memadamkan api.

Polisi yang datang ke



lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.

Kapolsek Sidoarjo Kota, AKP I Gusti Ag Ananta mengatakan, hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Namun diduga kebakaran itu akibat puntung rokok yang dibuang

sembarangan oleh pengunjung atau keluarga pasien.

“Telah terjadi kebakaran di ruang rawat inap RSUD Sidoarjo, tapi api sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab, masih diselidiki namun diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan,” katanya. **(Nang)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BERSINERGI:
Penandatanganan nota kesepahaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Dari kiri, Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali SIP, Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes, Wakil Ketua Bambang Riyoko SE, Kayan SH, dan Dr Emir Firdaus SST MM.

SUGENG GEAS/IAWA POS

DPRD Sidoarjo Dorong Pemkab Maksimalkan APBD 2024

DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Pengesahan dilangsungkan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sidoarjo Jumat (27/10).

Penandatanganan nota kesepahaman Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes, Wakil Ketua Bambang Riyoko SE, Kayan SH, dan Dr Emir Firdaus SST MM bersama Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor Ali SIP. Hadir pula dalam agenda tersebut, forkopimda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, MUI Kabupaten Sidoarjo, direktur BUMN dan BUMD, rektor perguruan tinggi, dan pimpinan partai politik.

Pada Raperda APBD Kabupaten Sidoarjo 2024 terdapat sejumlah perubahan. Di antaranya, pendapatan daerah dari Rp 4,61 triliun naik Rp 846 miliar menjadi Rp 4,98 triliun. Untuk belanja daerah yang semula Rp 4,41 triliun menjadi Rp 5,25 triliun atau naik Rp 846 miliar. Sementara itu, alokasi pembiayaan daerah tetap Rp 350 miliar.

Adanya kenaikan di struktur pendapatan sebesar Rp 846 miliar tersebut akan digunakan untuk pembiayaan program prioritas Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), UMKM, pendidikan, serta peningkatan bidang kesehatan.

Usman mendorong agar Pemkab menyelesaikan program dan proyek yang

sudah dijalankan beberapa tahun terakhir. Dia juga berharap, APBD 2024 bisa diserap maksimal sesuai kesepakatan bersama. Dewan bakal terus mengawal realisasi APBD tersebut. "Eksekutif sebagai pelaksana harus bisa merealisasikan



Eksekutif sebagai pelaksana APBD 2024 diharapkan mampu melakukan penyerapan dengan maksimal sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Kami, legislatif, akan terus mengawal realisasi APBD 2024 ke depan."

H USMAN MKES
Ketua DPRD Sidoarjo



dengan maksimal. Sehingga tercipta sebuah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan," ungkap Usman.

Tim Banggar DPRD Sidoarjo juga memberikan saran kepada Pemkab terkait penggunaan APBD 2024. Disampaikan oleh Jubir Banggar DPRD Sidoarjo H Moch. Agil Effendi, eksekutif diminta fokus menjalankan dan merealisasikan program prioritas sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Kami juga mendorong eksekutif untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai perencanaan agar realisasi APBD 2024 bisa maksimal," ungkap Agil.

Saran-saran juga diberikan oleh fraksi di DPRD Sidoarjo saat sesi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Salah satunya disampaikan H Haris SPI MSi yang merupakan perwakilan dari Fraksi PAN-PPP. Dia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan APBD 2024, Pemkab dituntut akomodatif dengan menyediakan banyak bantalan fiskal yang memadai. "Hal itu menjaga iklim kondusif untuk pembangunan serta pemilihan umum," ujarnya.

Gus Muhdlor, sapaan Ahmad Muhdlor, mengatakan bahwa setelah raperda disahkan, proses selanjutnya adalah evaluasi dari gubernur. APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut telah disusun berdasar pendekatan yang berpedoman pada prinsip tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, dan ekonomis.

"Diharapkan, APBD 2024 ini membawa manfaat bagi masyarakat. Serta, seluruh program bisa kami realisasikan dengan maksimal," ujar Gus Muhdlor. (ree/c6/xav)

Jawa Pos

DELTA PUNYA

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



AHMAD REZA/ JAWA POS

CUAN LUMAYAN: Warga Desa Gempolklutuk, Tarik, memeriksa kondisi tanaman wijen.

Kembangkan Sawah Wijen di TKD yang Mangkrak

SIDOARJO – Kendati tren tanaman hidroponik naik, Pemdes Gempolklutuk, Kecamatan Tarik, tak tertarik mengembangkannya. Mereka lebih memilih menanam wijen di tanah kas desa (TKD) yang mangkrak lama.

Kepala Desa Gempolklutuk Sugiono menuturkan, program sawah wijen dimulai pada 2021. "Pas itu ada program tanam wijen di desa ini dari Dinas Pertanian Jawa Timur sama pemkab sini," tuturnya.

Merasa cocok dan terbilang menghasilkan, para warga turut serta untuk mengelola sawah wijen. Sugiono mengungkapkan, mengurus sawah wijen terbilang lebih mudah daripada padi.

Sebenarnya sebelum wijen, TKD Gempolklutuk sempat ditanami padi atau

kacang hijau. Tetapi, hasilnya dirasa kurang baik sehingga tidak bisa dijual.

"Kalau wijen, biaya perawatan dan pemeliharaan relatif lebih murah dibandingkan yang lainnya menurut kami," jelasnya. Sejak 2021, beberapa kali sawah wijen di TKD Gempolklutuk panen.

Peminat hasil wijen juga terbilang banyak di sekitar Sidoarjo. "Selepas panen biasanya ada beberapa agen yang akan membeli wijen dari kita, ya lumayan hasilnya bisa untuk kas desa," ujarnya. (eza/c7/any)

Jawa Pos

Komunikasi Perangkat Desa Kedungcangkring Jabon Diduga Bobrok

Sidoarjo, Pojok Kiri

Puluhan warga Dusun Kedung Ules Desa Kedung Cangkring merasa dirugikan dengan buruknya sistem komunikasi perangkat Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon. Puluhan warga RT 11 RW 06 Dusun Kedung Ules terancam tidak bisa mendapatkan program pemasangan PDAM baru gratis dari program pemerintah.

Salah satu warga RT 11 RW 06 Dusun Kedung Ules, Maulidia menjelaskan sudah satu minggu ini sebagian besar warga Dusun Karombang dan warga Dusun Kawatan sudah menikmati aliran air bersih dari PDAM melalui program pemasangan PDAM baru gratis. Sementara di Dusun Kedung Ules hanya tujuh warga saja, itu pun merupakan keluarga dari Pengurus RT lama.

"Mengapa hanya keluarga Pak RT lama yang dapat, sedangkan kami warga bahkan tidak pernah mendapatkan sosialisasi program pemasangan PDAM baru gratis tersebut," jelas Maulidia, perwakilan warga RT 11 Dusun Kedung Ules saat bertemu dengan Kepala Desa Cangkring di Kantor Desa Kedung Cangkring,



Pemdes Kedungcangkring Jabon saat digruduk Warga Kedung Ules.

Senin (30/10/2023).

Maulidia menjelaskan saat warga RT 11 bertanya ke Pak RT lama tentang program tersebut, warga hanya mendapatkan informasi bahwa pendaftaran program tersebut sudah dilakukan pada Oktober 2022 lalu. Sementara dusun lain yang bisa menikmati program pemasangan PDAM baru gratis tersebut didatangi oleh ketua RT dari rumah ke rumah untuk mendapat program sampah dan PDAM pada Oktober 2022 lalu.

"Kami memang didata untuk program sampah, bahkan kami juga dimintai fotocopy KTP dan KK. Namun tidak ada dan tidak pernah ada sosialisasi tentang pemasangan PDAM baru gratis," ungkapnya.

Padahal, sambung dia, pemasangan pipa PDAM

tersebut ditanam di halaman rumah mereka. Tentunya warga RT 11 RW 06 Dusun Kedung Ules sangat berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan pemasangan PDAM baru gratis mengingat kualitas air sumur sudah tidak layak pakai akibat semburan lumpur Lapindo.

Kepala Desa Kedung Cangkring Yudi Anto menjelaskan kepada ibu-ibu RT 11 RW 06 Dusun Kedung Ules yang berkunjung ke Kantor Balai Desa bahwasanya pihaknya sudah melakukan sosialisasi dalam pertemuan yang menghadirkan Ketua RT, Ketua RW, Kasun dari delapan dusun yang ada di wilayah Kedung Cangkring.

"Tentu kami sudah melakukan sosialisasi program sampah dan PDAM ke-

pada semua Ketua RT, Ketua RW dan para kasun setahun yang lalu," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dusun Kedung Ules Alif mengaku dirinya sudah melakukan sosialisasi pada kegiatan pengajian bapak-bapak Dusun Kedung Ules dan tidak ada yang berminat terhadap program tersebut.

"Ini ada susulan bu, maka data semua warga Dusun Kedung Ules sudah saya masukkan semua," aku Alif kepada ibu-ibu Warga RT 11 RW 06 Dusun Kedung Ules di depan Kepala Desa Kedung Cangkring.

Kepala Desa Kedung Cangkring Yudi Anto menambahkan saat ini ada puluhan warga yang mundur dari program pemasangan PDAM baru gratis maka akan ada data susulan. Jadi

pihaknya tentu akan memasukkan data warga yang berminat termasuk warga Dusun Kedung Ules.

"Sungguh pak, kami tidak pernah mendengar bapak-bapak Kedung Ules ngomong tentang program PDAM ini. Kami sangat yakin kalau disosialisasikan pasti kami sangat berminat apalagi selama pemasangan pipa, kami sangat terdampak dengan rumah yang sangat berdebu dan kesulitan untuk memasukkan atau memarkirkan kendaraan bermotor selama pemasangan pipa berlangsung," papar Maulidia.

Sementara itu sumber dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo menjelaskan Program Pemasangan PDAM baru di Desa Kedung Cangkring ini kuotanya 371. Yang sudah terpasang dan dalam masa percobaan mengalir sudah ada 264 unit.

"Banyak yang mundur, kurang lebih ada 96 warga yang mundur. Untuk itu kami meminta data kembali ke pihak desa agar program ini bisa selesai tepat waktu," jelasnya.

Sumber tersebut juga menunjukkan data terakhir yang dikirim dari pihak Desa Kedung Cangkring hanya ada 4 warga dari Dusun Kedung Ules yang masuk dalam daftar tersebut. (dy/khol)

DIDUGA ADA MODUS MARK UP PEMBANGUNAN KIOS PASAR DI DESA KARANGBONG

Sidoarjo, Pojok Kiri

Penggelembungan (Mark'Up) modus ini biasanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa, beberapa faktor maraknya mark'up minimnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa termasuk mengenai anggaran desa dan belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan anggaran, serta keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa.

Seperti yang terjadi di desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, diduga Kangkangi adanya Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Dana Desa, Tujuan disalurkan nya dana desa adalah sebagai komitmen negara dalam melindungi dan mem-



berdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.

Besarnya Anggaran Yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk perkembangan dan kemajuan desa dikelola oleh pemerintahan desa diduga membuat oknum kepala desa gelap mata salah satunya yang diduga terjadi di desa Karangbong dalam program

pembangunan kios pasar desa dengan menelan anggaran fantastis Rp.197.900 juta. 4 unit kios beserta fasilitas MCK di RT/01.RW/03 anggaran dana desa TA 2023.

Dari hasil Investasi tim awak media Pojok Kiri di lapangan banyak di temukan kejangalan-kejangalan baik dari program Pembangunan Infrastruktur anggaran dana desa.

Anggaran yang di salurkan oleh pemerintah pusat di desa Karangbong namun diduga kucuran dana tersebut bukan untuk di prioritaskan dibangun namun kuat dugaan dana desa banyak di Mar'up atau di selawengkan oleh Oknum Kepala desa untuk meraup keuntungan, seperti pembangunan kios pasar desa dengan anggaran Rp.197 juta, padahal dalah satu pembangunan kios di desa yang

berada di Sidoarjo dengan pembangunan kios yang sama hanya menghabiskan anggaran Rp.135 juta, ini salah satu pembanding yang awak media dapatkan.

Ada juga rehabilitasi PAUD/TK di RT/03.RW/02 menelan anggaran Rp.58 juta tanpa disebutkan rehab ringan atau berat. Kepala Desa Karangbong Asmuni saat di konfirmasi melalui sambungan telepon tak menjawab, untuk pengim-bangan berita. Solik ketua LSM Alisni Masyarakat Perangi Korupsi (AMPK) akan melaporkan temuan ini ke inspektorat Kabupaten Sidoarjo agar turun ke desa Karangbong terkait adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa yang mengakibatkan bocornya anggaran dengan dugaan modus mengkorup anggaran. (Tim/Bersambung)



Bupati Lantik Pengurus Dekesda Sidoarjo Masa Bakti 2022-2027

Sidoarjo, Pojok Kiri

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengajak masyarakat Sidoarjo untuk melestarikan warisan seni budaya. Peralnya, perkembangan zaman saat ini serta gempuran budaya asing, menjadikan seni budaya mulai ditinggalkan.

"Cara kita agar tetap melestarikan seni budaya yang mulai tertinggal ini, yang pertama dengan cara mempelajari dan mengenal seni budaya kita, lalu memperkenalkan seni budaya kita ke

orang lain atau suatu daerah, serta tidak terpengaruh oleh seni budaya asing," katanya saat sambutan pelantikan pengurus Dewan Kesenian Sidoarjo (Dekesda) masa bakti 2022-2027 di Pendopo Delta Wibawa, Senin (30/10/2023).

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor juga memberikan dukungan semaksimal mungkin agar warisan seni budaya di Sidoarjo tidak terlupakan.

"Saya akan mendukung seratus persen segala hal

kegiatan yang berhubungan dengan seni budaya di Kabupaten Sidoarjo dengan catatan, kegiatan atau acara tersebut sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada di Kab. Sidoarjo," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo (Dekesda), Ribut Wijoto mengatakan cara efektif agar seni budaya di Kabupaten Sidoarjo tidak terlupakan yaitu dengan pagelaran event seni budaya.

"Event-event seni budaya menjadi salah satu

pendukung kesejahteraan masyarakat, dimana event seni budaya dapat menjadi branding Kab. Sidoarjo sebagai destinasi wisata berbasis seni budaya dan otomatis akan meningkatkan ekonomi Kab. Sidoarjo" ucapnya.

Ditambahkannya, dari data Dekesda terdapat empat warisan budaya yang telah dicatatkan diantaranya adalah Tari Banjar Kemuning, Musik Patrol, Kupang Lontong dan Udeng Pacul Gowang.

"Keempat warisan bu-

daya tersebut harus tetap kita lestarikan," pesannya.

Sekedar Informasi, Pemkab Sidoarjo tengah menyiapkan lomba-lomba tingkat RT se-Kabupaten Sidoarjo guna mendukung program Self Governing Community salah satunya lomba yang bertemakan seni budaya.

Turut hadir Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tirto Adi, dan Ketua Umum Dekesda, Ribut Wijoto beserta segenap pengurus Dekesda. (Khol/ Dy)

CS | Dibuat dengan CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT